

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 5, LD 2020/NO. 5, TLD 5, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No 12 2019; Perda Kab. Grobogan No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Grobogan No. 2 Tahun 2018; Perda Kab. Grobogan No. 12 Tahun 2018.
 - Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :laporan realisasi anggaran;laporan perubahan saldo anggaran lebih;neraca;laporan operasional;laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. <u>2.581.437.543.584,00</u>
b. Belanja	<u>Rp. 2.551.226.710.394,00</u>
Surplus	Rp. 30.210.833.190,00
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 165.056.361.798,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 60.506.522.234,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 104.549.839.564,00

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2020.